



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

PANGKALAN PSDKP BENOA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SDKP

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



panganbiru

08
PROSPEK BANGSA

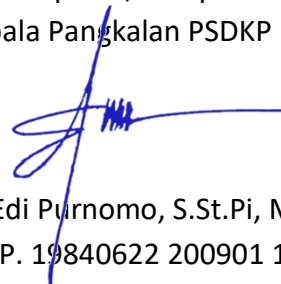
KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) pada Triwulan I Tahun 2026 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) pada Triwulan I Tahun 2026.

LKj Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Pangkalan PSDKP Benoa dalam kurun waktu triwulan I Tahun 2026. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Pangkalan PSDKP Benoa dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Denpasar, 18 April 2026
Kepala Pangkalan PSDKP Benoa



Edi Purnomo, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19840622 200901 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2026 yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Pangkalan PSDKP Benoa kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Pangkalan PSDKP Benoa telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Benoa menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁸⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan I tahun 2026 sebesar 112,5%. Jumlah indikator kinerja yang dihitung pada triwulan I sebanyak indikator Seluruh indikator kinerja yang berjumlah 21 indikator telah tercapai sesuai target.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2026 sebesar Rp. 32.248.369.000,00. Realisasi anggaran hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp. 7.213.479.655,- dengan persentase 22,37%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Aspek Startegis dan Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ..	2
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa	3
E. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	8
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2026	11
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	25
A. Kesimpulan	26
B. Rekomendasi	26
LAMPIRAN	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan SDKP Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Benoa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2025, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik berikutnya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Aspek strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Benoa antara lain :

1. Perkembangan teknologi saat ini sudah mencapai Teknologi 4.0, dimana dalam penggunaannya sudah mengintegrasikan teknologi digital canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), Big Data, *Cloud Computing*, dan otomatisasi. Penerapan teknologi tersebut sangat bermanfaat dalam manajemen pengelolaan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisiensi.
2. Sarana dan prasarana pengawasan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan pengawasan dalam bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa.

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP Pangkalan PSDKP Benoa, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

- a. Penerapan Teknologi Pengawasan Canggih (Advanced Technology)
- b. Penggunaan teknologi canggih dalam kegiatan pengawasan dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengawasan. Namun didalam penggunaannya membutuhkan SDM yang mumpuni dalam pengoperasian maupun analisa hasil pengawasan.
- c. Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing
- d. Pelanggaran IUU Fishing oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Indonesia yang semakin kompleks, terjadi modus operandi baru termasuk mark down (penurunan ukuran kapal dalam dokumen), penggunaan alat tangkap tidak sesuai standar/modifikasi, transshipment (alih muatan) di laut maupun kegiatan penyelundupan barang illegal melalui kapal perikanan.
- e. Penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) mendapat sejumlah penolakan dari beberapa aliansi nelayan (NTB, Probolinggo, Lamongan, Tuban). aliansi nelayan tersebut berpendapat bahwa jumlah prosentasi pungutan PNBK memberatkan nelayan dikarenakan biaya operasional penangkapan yang semakin meningkat. Pemasangan dan penggunaan VMS bagi kapal daerah yang telah bermigrasi (≤ 30 GT) dirasa memberatkan, khususnya bagi kapal pancing/rawai tuna (NTB).
- f. Konflik nelayan yang terjadi dikarenakan penggunaan alat penangkap ikan alat tangkap maupun jalur penangkap ikan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Banyak usaha budidaya yang belum memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) (resiko menengah tinggi).

- h. Tuntutan masyarakat terkait keamanan pangan produk perikanan Indonesia.
- i. Semenjak terjadinya kasus kontaminasi produk udang vaname
- j. Perlunya adanya pembelajaran maupun bimbingan teknis terkait penerapan KUHP dan KUHP baru, yang erat kaitannya dalam hal penegakan hukum pidana dibidang kelautan dan perikanan.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Banyak pelaku usaha perikanan dan kelautan yang belum memiliki maupun mengetahui perizinan berusaha pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE).
- b. Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana pada pemanfaatan air laut > 30 M³/Bulan harus memiliki izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, sebagian besar air laut yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha berjumlah > 30 M³/Bulan. Sehingga dalam perizinannya menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (pusat).
- c. Banyak pelaku usaha yang belum memahami aturan dibidang kelautan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, beberapa peraturan dibidang kelautan dan PWP3K mengalami perubahan, sehingga diperlukan sosialisasi yang masif terkait aturan tersebut. Sehingga dalam penerapan sanksi, ketidaktahuan aturan tidak lagi menjadi alasan para pelaku usaha dalam melakukan usaha dibidang kelautan dan PWP3K.
- d. Pencemaran laut. Masih banyak ditemukan sampah dilaut, khususnya sampah plastik yang membahayakan ekosistem laut. Sebagian besar sampah plastik di laut berasal dari aktivitas daratan yang terbawa melalui sungai maupun aktivitas kelautan seperti sisa jaring ikan yang hilang/terbuang, limbah kapal maupun aktivitas pariwisata pantai.
- e. Perlu peningkatan kapasitas sdm pengawas kelautan/polsus PWP3K dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan PWP3K. Adapun peningkatan yang dibutuhkan yaitu dalam pengoperasian drone, software GIS, dll.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Benoa mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pangkalan PSDKP Benoa dipimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ketua Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas.

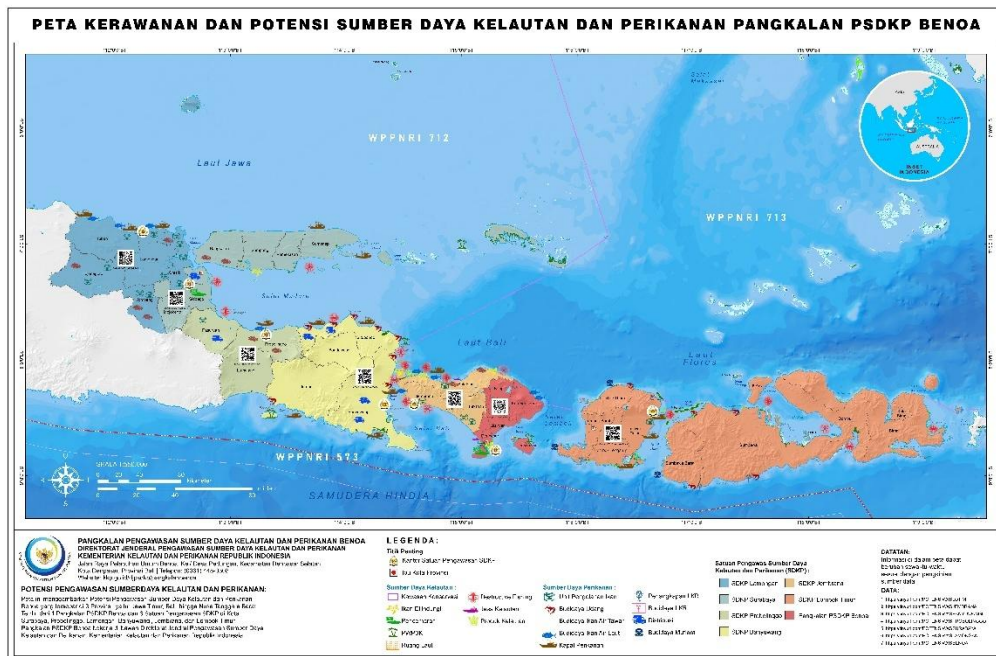
Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Bena membawahi 6 (enam) Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) yaitu sebagai berikut:

1. Satwas SDKP Lombok Timur;
2. Satwas SDKP Jembrana;
3. Satwas SDKP Banyuwangi;
4. Satwas SDKP Probolinggo;
5. Satwas SDKP Lamongan;
6. Satwas SDKP Surabaya.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bena



E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Bena Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang gambaran umum Pangkalan PSDKP Bena, aspek strategis dan isu aktual pengawasan SDKP

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perjanjian Kinerja tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian Pangkalan PSDKP Benoa pada Triwulan I Tahun 2026.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Bab V Lampiran

Melampirkan perjanjian kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 86 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah :

“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan misi :

“Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis”

“Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP”

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu :

“Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta

**Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.”
dan**

**“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan
Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP”**

Berdasarkan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah sasaran program Ditjen PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut :

- a. SS-1 terlindunginya laut dan sumber dayanya serta menjaga kelestarian wilayah laut;
- b. SS-2 Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. SS-3 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional
- d. SS-4 Meningkatnya kualitas SDM kelautan dan perikanan
- e. SS-5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

Dari sasaran KKP di atas, Ditjen PSDKP mempunyai sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- b. Indeks reformasi birokrasi KKP

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Pada tahun 2026 Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas	92,25
		7 Indeks operasi speedboat pengawas	92,25
		8 Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82
		10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82
7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	82
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa	81,75
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Benoa	92,1
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa	81,5
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa	88,2
		16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Benoa	100%
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86%
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa	88,8
		19 Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Benoa	75
		20 Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa	78
		21 Nilai implementasi program budaya kerja	71

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Pangkalan PSDKP Benoa dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerja berbasis informasi teknologi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2026

Dalam pengelolaan kinerja Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa sebesar 112,5 %, sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut :

Gambar 3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026



Pada triwulan I tahun 2026 terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang menjadi target dan dihitung capaiannya. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan I tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan I		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83			
2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100			
3	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100			
4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83	50	83,87	120,00
5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	60	73,79	120,00
6	Indeks operasi kapal pengawas	92,25	89	82,98	93,24
7	Indeks operasi speedboat pengawas	92,25	89	97,5	109,55

No	Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan I		Capaian
			Target	Realisasi	
8	Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP	100			
9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82	65	98,39	120,00
10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	65	93,55	120,00
11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	82			
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa	81,75			
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Benoa	92,1			
14	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa	81,5			
15	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa	88,2			
16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Benoa	100%	100%	100%	100,00
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86%	85%	86%	101,18
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa	88,8	88,8	90,66	102,09
19	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Benoa	75			
20	Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa	78			
21	Nilai implementasi program budaya kerja	71			

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada triwulan I tahun 2026, Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan.

Indikator Kinerja 4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan" dengan capaian 83,87, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83	-	-	-	50	83,87	120

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan I tahun 2026 realisasi indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah 83,87 dari yang ditargetkan sebesar 50 dengan capaian 120%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya karena perbedaan nomenklatur dan formula perhitungan indikator.

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan insidental yang dilaksanakan oleh pengawas kelautan dan/atau polsus PWP3K lingkup Pangkalan PSDKP Benoa terhadap pelaku usaha yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional yang dilakukan secara insidental. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan indikator komposit dari nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dan nilai tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan / perbaikan pelaku usaha kelautan. Pada triwulan I Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 80 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dengan jumlah rekomendasi sebanyak 6 dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 5. Sehingga dengan formulasi yang telah ditentukan diperoleh nilai kualitas sumber daya kelautan 83,87. Perhitungan dan jumlah pelaku usaha kelautan yang telah diperiksa terlampir.

Pencapaian kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa telah melebihi dari target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2026. Pencapaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan oleh pengawas kelautan dan polsus PWP3K lingkup Pangkalan PSDKP Benoa terhadap 80 pelaku usaha pada wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa. Keberhasilan pencapaian ini merupakan hasil yang dilakukan oleh 6 (enam) pengawas kelautan dan 19 polsus PWP3K lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh kompetensi yang dimiliki oleh pengawas kelautan dan polsus PWP3K di lingkup Pangkapan PSDKP Benoa serta dengan dukungan fasilitas sarana yang dimiliki Pangkalan PSDKP Benoa. Untuk meningkatkan kompetensi pengawas kelautan dan polsus PWP3K pada tanggal 22 Januari 2026 mengadakan pelatihan pemetaan untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa. Selain itu juga didukung dengan adanya koordinasi Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan pokmaswas serta sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan melalui media sosial.

Alokasi anggaran tahun 2026 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 1.265.568.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 188.613.693,- atau 14,90%.

Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan" telah diidentifikasi dalam indikator kinerja "Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan".

Indikator Kinerja 5. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan" triwulan I tahun 2026 adalah 73,79 dari target sebesar 60. Capaian kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	-	-	-	60	73,79	120

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2026 realisasi nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 73,79 dari yang ditargetkan sebesar 60 dengan capaian 120%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya karena perbedaan nomenklatur dan formula perhitungan indikator kinerja.

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Capaian indikator kinerja nilai kualitas sumber daya perikanan diperoleh dari 35 pelaku usaha/ NKP yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Pangkalan PSDKP Benoa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pengawasan Sumber Daya Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026

Jenis Pengawasan	Jumlah Riksa	Rekomendasi		
		Telah Memenuhi Syarat	Pembinaan dan Perbaikan	Sanksi
Pengawasan Jenis Ikan dilindungi, Invasif dan Membahayakan	7	6	1	-
Pengawasan Kapal Penangkapan Ikan	4	4	-	-
Pengawasan SPKP	4	3	-	1
Pengawasan Budidaya Perikanan	8	2	-	6
Pengawasan Pengolahan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	11	9	1	1
Pengawasan Destructive Fishing	1	1	-	-
Total	35	25	2	8

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan dan jumlah pelaku usaha perikanan yang telah diperiksa pada triwulan I terlampir.

Pencapaian kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa telah melebihi dari target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2026. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa. dimana pengawas perikanan yang tersebar di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa berjumlah 57 orang. Keberhasilan pencapaian ini selain didukung dengan anggaran operasional dan sarana prasarana yang ada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa juga didukung dengan terjalannya koordinasi yang baik Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 877.030.000, . Sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 106.036.574,- atau 12,09%.

Sasaran Kegiatan 5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks Operasi Kapal Pengawas; ²⁾ Indeks Operasi Speedboat Pengawas; ³⁾ Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP;

Indikator Kinerja 6. Indeks Operasi Kapal Pengawas

Capaian indikator "Indeks Operasi Kapal Pengawas" pada triwulan I tahun 2026 sebesar 82,98 dari target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu sebesar 89. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Capaian indikator kinerja Indeks Operasi Kapal Pengawas

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Indeks operasi kapal pengawas	92,25	-	-	-	89	82,98	93,24

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan I tahun 2026 realisasi Indeks operasi kapal pengawas adalah 82,98 dari yang ditargetkan sebesar 89 sehingga persentase capaian adalah 93,24% atau target pada triwulan I tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pada triwulan I operasi kapal pengawas Hiu Macan Tutul 02 tidak ada pemeriksaan objek kelautan. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2025, karena tahun 2025 tidak ada target pada triwulan I karena adanya efisiensi anggaran.

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, *Illegal*, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pencapaian indikator kinerja indeks operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Benoa pada Triwulan I tahun 2026 diperoleh dari kegiatan operasi kapal pengawas di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa sebagai berikut :

Tabel 3.6. Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026

No	Kapal Pengawas	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam	Jumlah Kapal Diperiksa	Jumlah Kapal Melanggar	Jumlah Kelautan yang diperiksa	Indeks per Kapal	Total Indeks Operasi
1	KP. Hiu Macan Tutul 02	11	120,83	19	0	0	68,05	82,98
2	KP. Hiu 009	5	62,51	17	0	1	97,90	

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas yang telah dilaksanakan tersebut maka dengan pengukuran indeks menggunakan formulasi yang telah ditetapkan diperoleh capaian indeks operasi kapal pengawas pada triwulan I tahun 2026 yaitu 82,98.

Pencapaian kinerja Indeks Operasi Kapal Pengawas tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada triwulan I dikarenakan operasi kapal pengawas Hiu Macan Tutul 02 tidak ada pemeriksaan objek kelautan. Dalam pencapaian kinerja ini kapal pengawas Pangkalan PSDKP Benoa didukung oleh 31 awak kapal dimana Hiu Macan Tutul 02 didukung oleh 20 awak kapal dan Hiu 009 didukung oleh 11 awak kapal yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatannya masing-masing dalam tugasnya dan kondisi kapal pengawas yang dalam keadaan baik (siap operasi). Selain itu pencapaian ini juga didukung dengan adanya kerja sama serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Operasi Kapal Pengawas” sebesar Rp. 10.788.216.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi Rp. 1.575.390.268,- atau 14,60%.

Indikator Kinerja 7. Indeks Operasi Speedboat Pengawas

Capaian indikator “Indeks Operasi Speedboat Pengawas” pada tahun 2026 sebesar 94,97 dari target yang ditetapkan sebesar 92. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Capaian Indikator Operasi Speedboat Pengawas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Indeks operasi speedboat pengawas	92,25	-	-	-	89	97,5	109,55

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan I tahun 2026 realisasi Indeks kinerja operasi Speedboat pengawas adalah 97,5 dari yang ditargetkan sebesar 89. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2025, karena tahun 2025 tidak ada target pada triwulan I karena adanya efisiensi anggaran.

Indeks Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon *Illegal*, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pencapaian indikator kinerja indeks operasi speedboat pengawas Pangkalan PSDKP Bena pada triwulan I tahun 2026 diperoleh dari pelaksanaan kegiatan operasi speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Bena pada periode Januari sampai Maret tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas Triwulan I Tahun 2026

No	Speedboat Pengawas	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam	Jumlah Kapal Diperiksa	Jumlah Objek Kelautan Diperiksa
1	Napoleon 007 (Bena)	10	66,75	16	1

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas tersebut maka dengan pengukuran indeks menggunakan formulasi yang telah ditetapkan diperoleh capaian indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada triwulan I tahun 2026 yaitu 97,5.

Pencapaian kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat telah melebihi dari target yang ditetapkan pada trwulan I tahun 2026 yaitu 89. Pencapaian ini diperoleh dari speedboat

lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dalam kondisi siap operasi karena selalu dilakukan perawatan baik perawatan rutin maupun darurat serta operator speedboat yang berkompeten. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dalam melaksanakan patroli di laut.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Operasi Speedboat Pengawas” sebesar Rp. 427.255.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi Rp. 32.165.000,- atau 7,53%.

Sasaran Kegiatan 6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan; dan ²⁾ Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja 9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Capaian indikator “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” pada triwulan I tahun 2026 sebesar 98,39 dari target yang ditetapkan 65. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 206

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82	40	81	120	65	98,39	120

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan I tahun 2026 realisasi indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 98,39 dari yang ditargetkan sebesar 65. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2025 mengalami kenaikan.

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang dalam hal ini Pangkalan PSDKP Benoa, untuk :

- a. Pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Surat Peringatan-2 (SP2) dan atau Paksaan Pemerintah (PP);
- b. Pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman,

penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Pencapaian indikator kinerja Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan I tahun 2026 diperoleh dari pelanggaran yang ditangani oleh lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa. Penerapan sanksi administratif diperoleh dari persentase penghitungan rata-rata dua 2 sub komponen yaitu :

a. Penerapan sanksi administratif SPKP

Penerapan sanksi administratif SPKP didapatkan dari jumlah Lembar Indikasi Pelanggaran (LIP) yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan (sanksi atau laporan bukan pelanggaran) dibagi jumlah LIP yang diterbitkan. Jumlah LIP Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 31 dan LIP yang telah ditindaklanjuti sebanyak 29. Sehingga penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran SPKP sebanyak 93,55.

Tabel 3.10. Penerapan Sanksi Administratif SPKP Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026

No	Penerapan Sanksi Administratif SPKP	Jumlah
1	Surat Pemanggilan	13
2	Proses BAP	5
3	Bukan Pelanggaran	5
4	Surat Peringatan I	6
Jumlah		

b. Penerapan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan.

Penerapan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan didapatkan dari jumlah penetapan sanksi dibagi jumlah pelanggaran. Jumlah pelanggaran bidang kelautan dan perikanan triwulan I tahun 2026 sebanyak 25. Dan semuanya telah dikenakan sanksi sebagai berikut:

Tabel 3.11. Penerapan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026

No	Penerapan Sanksi Administratif	SDK	SDP	Jumlah
1	Surat Peringatan I	1	9	10
2	Surat Peringatan 2			
3	SP 3			
4	Paksaan Pemerintah	1	7	8
5	Denda Administratif	1	6	7
Jumlah		3	22	25

Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas perikanan, polsus PWP3K dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 57 orang, pengawas kelautan 9 orang, polsus PWP3K

sebanyak 19 orang dan PPNS berjumlah 17 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki PPNS Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait kasus-kasus yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 173.189.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi Rp. 35.353.134,- atau 20,41%.

Indikator Kinerja 10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Capaian indikator “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” pada tahun 2026 sebesar 93,55 dari target yang ditetapkan 65. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	40	81	120	65	93,55	120

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan I tahun 2026 realisasi indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 93,55 atau 120% dari yang ditargetkan sebesar 65. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2025 mengalami kenaikan.

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan indeks diperoleh dari jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa dibagi jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis pemantauan.

Pada triwulan I tahun 2026 di Pangkalan PSDKP Benoa terdapat 31 dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis SPKP (LIP) dan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 29 dugaan pelanggaran, dimana 13 dalam proses pemanggilan, 5 dalam proses BAP, 5 bukan merupakan pelanggaran, dan sebanyak 6 SP1. Berdasarkan formula perhitungan indeks pemeriksaan analisis SPKP persentase tindak lanjut adalah 93,55. Sehingga diperoleh capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 93,55. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas

perikanan dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 57 orang dan PPNS berjumlah 17 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait penanganan pelanggaran khususnya analisis SPKP yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan” Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 173.189.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi Rp. 35.353.134,- atau 20,41%.

Sasaran Kegiatan 8 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”, Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 10 indikator kinerja yaitu : ⁽¹⁾ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽²⁾ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽³⁾ Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁴⁾ Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁵⁾ Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁶⁾ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; ⁽⁷⁾ Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁸⁾ Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁹⁾ Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽¹⁰⁾ Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.

Capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” pada triwulan I tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincih dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama	Triwulan I Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa	100	100	100
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	85	86	101,18
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Pangkalan PSDKP Benoa	88,8	90,66	102,09

Indikator Kinerja 14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Bena

Capaian indikator “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Bena” pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian pada triwulan ini sama jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025.

Tabel 3.14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bena (persen)

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Bena	100	100	100	100	100	100	100

Penilaian risiko dilakukan melalui form penilaian risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Dari form pemantauan risiko Pangkalan PSDKP Bena pada triwulan I tahun 2026 memiliki 8 rencana pengendalian risiko dan 8 realisasi pengendalian risiko, sehingga capaian persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Bena adalah 100%. Tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pendampingan penyusunan manajemen risiko oleh Setditjen PSDKP serta rapat internal Pangkalan PSDKP Bena dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian yang bersifat rutin, berkala dan dengan pendekatan manajemen risiko.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 6.999.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2026 belum ada realisasi.

Indikator Kinerja 17. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pangkalan PSDKP Bena yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Bena berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 (Triwulan IV tahun 2025) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pada tahun 2025 di Pangkalan PSDKP Bena tidak ada rekomendasi hasil pengawasan (LHP) yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal. Sehingga sesuai dengan manual indikator kinerja, apabila tidak ada rekomendasi hasil pengawasan (LHP) maka capaian pada triwulan I tahun 2026 adalah 86 (sama dengan target tahun 2026). Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh kerja sama dan komunikasi antar tim kerja dalam menindak lanjuti rekomendasi LHP serta koordinasi dengan tim Setditjen PSDKP.

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 lebih rendah dari capaian pada triwulan I tahun 2025 karena perbedaan perhitungan indikator.

Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86	95	100	105,26	85	86	101,18

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 6.999.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2026 belum ada realisasi.

Indikator Kinerja 18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa

Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa adalah data informasi masyarakat yang diperoleh dari survey pelayanan publik di Pangkalan PSDKP Benoa terhadap pelayanan penerbitan SLO dan HPK Kedatangan melalui aplikasi SI SUSAN. Capaian indikator Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa triwulan I tahun 2026 adalah 90,66 dari target yang ditetapkan 88,8. Capaian indikator ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 (88,66). Hal ini dikarenakan Pangkalan PSDKP Benoa selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi di media sosial maupun tatap muka langsung pada saat pelayanan kepada pengguna layanan.

Tabel 3.16. Capaian Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
		T	R	%	T	R	%
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Pangkalan PSDKP Benoa	88,8	88,5	88,66	100,18	88,8	90,66	102,09

Capaian kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan I tahun 2026 adalah 90,66 dan telah memenuhi target sebesar 88,8 dengan capaian 102,09 %. Nilai tersebut diperoleh karena pelayanan yang diberikan terhadap pengguna layanan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tersebut adalah sarana yang mendukung dan sosialisasi yang dilaksanakan baik pada saat melayani pelaku usaha maupun melalui media sosial.

Pelayanan publik penerbitan SLO dan HPK Kedatangan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dilaksanakan pada beberapa satwas maupun wilker sebagai berikut :

1. Pangkalan PSDKP Bena;
2. Satwas SDKP Lombok Timur;
3. Wilker Teluk Awang;
4. Wilker Tanjung Luar;
5. Wilker Sape;
6. Satwas SDKP Jembrana;
7. Satwas SDKP Banyuwangi;
8. Wilker PP Masami;
9. PU Tanjung Wangi;
10. Satwas SDKP Probolinggo;
11. Satwas SDKP Surabaya;
12. Satwas SDKP Lamongan;
13. Wilker SDKP Bulu;
14. Wilker Gresik;
15. Wilker Tuban;
16. PPI Kranji;
17. Wilker Sumenep;
18. Wilker Situbondo.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 6.536.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 600.000,- atau 9,18%.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Bena TA. 2026 sebesar Rp. 32.248.369.000,-. Realisasi anggaran hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp 7.213.479.655,- dengan persentase 22,37%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Bena tahun 2026 berdasarkan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	13.539.433.000	2.132.6652.484	15,75
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	282.099.000	45.105.345	15,99
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.253.276.000	294.650.267	13,06
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	81.260.000	0	0
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	16.092.301.000	4.741.061.559	29,46
TOTAL		32.248.369.000	7.213.479.655	22,37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa triwulan I tahun 2026 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2026, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan .
2. Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan I tahun 2026 mencapai 112,5 % dengan realisasi anggaran sebesar 22,37%
3. Dari 9 (sembilan) capaian indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan I tahun 2026, ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Indeks operasi kapal pengawas. Namun demikian Pangkalan PSDKP Benoa akan terus meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Benoa untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekomendasi Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2026

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Capaian indeks operasi kapal pengawas (pemeriksaan objek kelautan oleh KP. Hiu Macan Tutul 02)	Pengusulan diklat Polsus PWP3K awak kapal KP. Hiu Macan Tutul 02

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL dijenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Purnomo

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

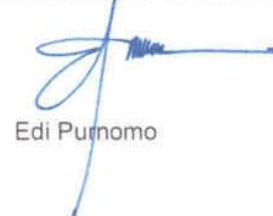
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa


Edi Purnomo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas	92,25
		7 Indeks operasi speedboat pengawas	92,25
		8 Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82
		10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82
7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	82
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa	81,75
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Benoa	92,1
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa	81,5
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa	88,2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
		16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Benoa	100%
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86%
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa	88,8
		19 Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Benoa	75
		20 Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa	78
		21 Nilai implementasi program budaya kerja	71

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
a.	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	13.539.433.000
b.	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	282.099.000
c.	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.253.276.000
d.	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	81.260.000
2.	Program Dukungan Manajemen	16.092.301.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2026		33.490.528.000

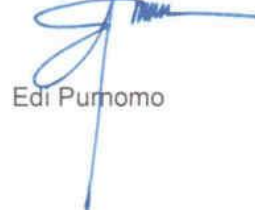
Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa



Edi Purnomo

2. PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA NILAI KUALITAS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Formula :

$$X = (a \times 0,8) + (b \times 0,2)$$

Keterangan :

X : Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

a : Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan

b : Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha

Perhitungan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan (*a*)

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}} = \frac{6720}{80} = \mathbf{84}$$

No.	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	10	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengaduan/nota dinas/hasil penilaian laporan tahunan (5) Surat tugas (5)
2	Pelaksanaan	50	Dokumen Hasil Pengawasan
		4	Tidak mendapatkan catatan perbaikan dari verifikator Direktorat PSDK
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK
TOTAL		84	

Perhitungan tindak lanjut perbaikan (*b*)

$$b = \frac{\sum \text{nilai tindak lanjut rekomendasi}}{\text{jumlah rekomendasi}} = \frac{100 \times 5}{6} = \mathbf{83,33}$$

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan TW I 2026 :

$$X = (84 \times 0,8) + (83,33 \times 0,2) = \mathbf{83,87 \text{ (Kategori Baik)}}$$

Nilai	Kategori
> 85	Sangat Baik
66 - 85	Baik
50 - 65	Cukup Baik
< 50	Tidak Baik

No.	Nama Pelaku usaha (PRL)	Persiapan	Dokumen Pengawasan	Catatan Verifikasi	Pelaporan	Total Nilai Pengawasan
1	PT. Berlian Manyar Sejahtera	10	50	0	20	80
2	PT. Berlian Manyar Sejahtera	10	50	0	20	80
3	PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA	10	50	0	20	80
4	PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA	10	50	0	20	80
5	PT. Submarine Safaris Asia	10	50	20	20	100
6	PT. Submarine Safaris Asia	10	50	20	20	100
7	PT. Step Up Solusi Indonesia	10	50	15	20	95
8	PT. Bali Double C	10	50	0	20	80
9	PT. Bali Double C	10	50	0	20	80
10	PT. Dinar Darum Lestari	10	50	0	20	80
11	PT. Dinar Darum Lestari	10	50	0	20	80
12	PT. Dinar Darum Lestari	10	50	0	20	80
13	PT. Dinar Darum Lestari	10	50	0	20	80
14	PT. Graha Alam Lestari	10	50	0	20	80
15	PT. Intisamudra Lestari	10	50	0	20	80
16	PT. Intisamudra Lestari	10	50	0	20	80
17	PT. Cendana Indopearls	10	50	0	20	80
18	MOD SUKSES MAKMUR, Tbk. BOGASARI FLOUR MILLS	10	50	0	20	80
19	I Gusti Lanang Putra Wijaya	10	50	0	20	80
20	PT. Angkal Bali Perkasa	10	50	0	20	80
21	PT. Bali Barra Mundi	10	50	0	20	80
22	PT. Phillips Seafoods Indonesia	10	50	0	20	80
23	PT. Phillips Seafoods Indonesia	10	50	0	20	80
24	PT. Phillips Seafoods Indonesia	10	50	0	20	80
25	PT. Phillips Seafoods Indonesia	10	50	0	20	80
26	PT. Menjangan Mas	10	50	0	20	80
27	PT. Lautan Berkah Perkasa	10	50	20	0	80
28	Liauw Bobby Edmond	10	50	5	20	85
29	PT. Smelting	10	50	5	20	85
30	PT. Semen Indonesia Gresik	10	50	5	20	85
31	PT. Semen Indonesia Gresik	10	50	5	20	85
32	PT. Sea Six Energy Indonesia	10	50	5	20	85
33	PT. Tirta Samudra Bali	10	50	5	20	85
34	PT. Pelabuhan Indonesia Maspion	10	50	5	20	85
35	PT. Pelabuhan Indonesia Maspion	10	50	5	20	85
36	PT. Waka Oberoi Indonesia	10	50	5	20	85
37	PT. The Lombok Lodge	10	50	5	20	85
38	PT. Prima Larvae Bali	10	50	5	20	85
39	CV. Trimitra Makmur	10	50	5	20	85
40	CV. JS Marine Blue	10	50	5	20	85
41	PT. TIRTA SAMUDRA BALI	10	50	5	20	85
42	PT. ANEKA TIRTA SURYA	10	50	5	20	85
43	PT. NINI SRIREJEKI	10	50	5	20	85
44	PT. ANEKA KARANG SEPAJANG	10	50	5	20	85
45	CV. Blue Star Aquatic	10	50	5	20	85
46	PT. Neptune Aquatic Marine	10	50	5	20	85
47	PT. Bali Turtle Island Development	10	50	5	20	85
48	PT. Demonika Perkasa	10	50	5	20	85
49	PT. KUTAI TIMBER INDONESIA	10	50	5	20	85
50	PT. PAKARTI DAKSA SEGARA	10	50	5	20	85
51	CV. MUSI JAYA	10	50	5	20	85
52	KETUT BAGUS IRAWAN	10	50	5	20	85
53	PT. SUMATERA BUDIDAYA MARINE	10	50	5	20	85
54	CV. SURUNG	10	50	5	20	85
55	PUTU FRANS EDWIN SUWANDIKA	10	50	5	20	85
56	PT. IANDV BIO INDONESIA	10	50	5	20	85
57	PT. MATAHARI CIPTA SENTOSA	10	50	5	20	85
58	PT. SUMBER ANUGERAH MAKMUR	10	50	5	20	85
59	PT. SEACLIFF INTERNATIONAL	10	50	5	20	85
60	PT. PENGELOLA MERTASARI BERSAMA	10	50	5	20	85
61	PT. PENGELOLA MERTASARI BERSAMA	10	50	5	20	85
62	PT. PELABUHAN INDONESIA (BENOA)	10	50	5	20	85
63	PT. PELABUHAN INDONESIA (BENOA)	10	50	5	20	85
64	PT. PELABUHAN INDONESIA (BENOA)	10	50	5	20	85
65	PT. Regas Energitama Infrastruktur	10	50	5	20	85

3. PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA NILAI KUALITAS PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

FORMULA PERHITUNGAN

$$y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan:

y_{waskan} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan
 x_i : Nilai komponen yang tersedia
 n : Jumlah komponen yang tersedia.

Dimana komponennya antara lain:

a) Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur ($x_{pemeriksaan}$)

$$x_{pemeriksaan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}} = \frac{3.395}{35} \times 100 \% = \mathbf{97.57}$$

Adapun nilai tahapan pemeriksaan diberikan untuk setiap pelaku usaha berdasarkan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output/kriteria
1	Perencanaan	5	Surat dinas atau Dasar pelaksanaan pengawasan
		5	SPT
2	Pelaksanaan	50	Dokumen hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan (hasil Pengawasan/ Form Pengawasan/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)) dan data dukung sesuai SOP/Juknis perngawasan perikanan
		20	Dokumen hasil pemeriksaan telah diverifikasi oleh verifikator Direktorat PSDP dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 20 poin: tidak terdapat catatan perbaikan; • 15 poin: terdapat catatan perbaikan administratif; • 10 poin: terdapat catatan perbaikan teknis; • 5 poin: terdapat catatan perbaikan administratif dan teknis.
3	Pelaporan	10	Laporan pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilegalkan oleh Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan ke

		aplikasi wasrisk atau tautan money Gdrive Direktorat PSDP
	10	Disampaikan tepat waktu paling lambat 14 hari dari tanggal Pengawasan dan 3 hari sebelum periode pengukuran Direktorat PSDP
Jumlah Nilai		100

a) Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan ($x_{tl_perbaikan}$):

$$x_{tl_perbaikan} = \frac{\text{Jumlah Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

$$= \frac{1}{2} \times 100 = 50$$

Adapun nilai untuk setiap tindak lanjut perbaikan suatu pelaku usaha sebagai berikut:

No	Kondisi	Skor
1	Seluruh rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha	100
2	Sebagian besar rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha	80
3	Hanya sebagian kecil rekomendasi yang dipenuhi pelaku usaha	60
4	Pelaku usaha tidak menjalani rekomendasi	0

Paramater nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan ($y_{kualitas_waskan}$):

$$y_{kualitas_waskan} : \frac{x_{pemeriksaan} + x_{tl_perbaikan}}{\text{komponen penilaian}} = \frac{97.57+50}{2} = 73.79 \text{ (Baik)}$$

Nilai Kualitas Sangat Baik	:	>85	
Nilai Kualitas Baik	:	66 - 85	
Nilai Kualitas Cukup Baik	:	50 - 65	
Nilai Kualitas Kurang	:	< 50	

REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN SDP TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Nama Pelaku Usaha	Sub Kegiatan Pengawasan	Perencanaan		Pemeriksaan		Pelaporan		Total
			Nota Dinas	SPT	BAP	Verifikasi	Laporan	Tepat Waktu	
1	KM. KRESNA FISHING	Destruktive Fishing	5	5	50	20	10	10	100
2	IAMBEU MINA UTAMA	Penangkapan Ikan	5	5	50	20	10	10	100
3	IAMBEU MINA UTAMA	Penangkapan Ikan	5	5	50	20	10	10	100
4	BANDAR BENOA BALI	Penangkapan Ikan	5	5	50	20	10	10	100
5	BANDAR BENOA BALI	Penangkapan Ikan	5	5	50	20	10	10	100
6	MIASIM DELA RAHMAWATI	Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	5	5	50	20	10	10	100
7	PT. DUNIA REPTIL INDONESIA	Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	5	5	50	10	10	10	90
8	PT. SAHYADI AQUATIC	Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	5	5	50	20	10	10	100
9	UD. BALI AQUARICH	Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	5	5	50	20	10	10	100
10	CV. CAHAYA BAHARI	Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	5	5	50	20	10	10	100
11	UD. AKBAR JAYA	Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	5	5	50	20	10	10	100
12	UD. MAKMUR	Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	5	5	50	20	10	10	100
13	PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA	Pengawasan Budidaya	5	5	50	20	<u>10</u>	<u>10</u>	100
14	PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA	Pengawasan Budidaya	5	5	50	20	<u>10</u>	<u>10</u>	100
15	PT. CARIDEA SUMBAWA AV11	Pengawasan Budidaya	5	5	50	20	<u>10</u>	<u>10</u>	100
16	PT. SUMBAWA DELAPAN PENJURU	Pengawasan Budidaya	5	5	50	20	<u>10</u>	<u>10</u>	100
17	PT. VAJAU INDONESIA	Pengawasan Budidaya	5	5	50	20	<u>10</u>	<u>10</u>	100
18	PT. VAJAU INDONESIA	Pengawasan Budidaya	5	5	50	20	<u>10</u>	<u>10</u>	100
19	PT. CARIDEA JAYA LESTARI	Pengawasan Budidaya	5	5	50	20	<u>10</u>	<u>10</u>	100
20	PT. SOLUSI MASYARAKAT MANDIRI	Pengawasan Budidaya	5	5	50	20	<u>10</u>	<u>10</u>	100
21	KOPERASI GANESHA LAUT NUSANTARA	Distribusi BBL/LKR	5	5	50	20	10	10	100
22	HERI SURYATA	Distribusi BBL/LKR	5	5	50	10	10	10	90
23	SAMSUL ARIFIN	Distribusi BBL/LKR	5	5	50	10	10	10	90
24	PT. PROTEIN INDUSTRI PAKAN INDONESIA	Impor Bahan Baku Pakan Ikan/Pakan Ikan	5	5	50	20	10	10	100
25	PT. INDO LAUTAN MAKMUR	Pengolahan Insidental	5	5	50	20	10	10	100
26	PT. HOI HING INVESTMENT	Pengolahan Insidental	5	5	50	20	10	10	100
27	PT. LAUTINDO SYNEGY SEJAHTERA	Pengolahan Insidental	5	5	50	15	10	10	95
28	PT. LAUTINDO SYNEGY SEJAHTERA	Pengolahan Insidental	5	5	50	15	10	10	95
29	PT. LAUTINDO SYNEGY SEJAHTERA	Pengolahan Insidental	5	5	50	15	10	10	95
30	PT. PACIFIC MARITIME INDONESIA	Pembudidayaan BBL/LKR	5	5	50	20	10	10	100
31	PT. KIRANA FOOD INTERNATIONAL	Pengawasan NonOSS_Impor	5	5	50	10	10	10	90
32	KM. PERINTIS JAYA 17	Pengawasan SPKP	5	5	50	10	10	10	90

33	KM. BANDAR NELAYAN 803	Pengawasan SPKP	5	5	50	10	10	10	90
34	KM. WIRA BUANA	Pengawasan SPKP	5	5	50	15	10	10	95
35	KM. RAFA JAYA - I	Pengawasan SPKP	5	5	50	15	10	10	95
TOTAL									3.395